

SKRIPSI



ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)

Oleh

BAYU LESMANA

B111 09 300

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA
IZIN ISTERI PERTAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/ PID.B/ 2012/ PN.MRS)

Oleh:

BAYU LESMANA

B111 09 300

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA
IZIN ISTERI PERTAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/ PID.B/ 2012/ PN.MRS)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**BAYU LESMANA
B111 09 300**

**TELAH DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
YANG DIBENTUK DALAM RANGKA PENYELESAIAN STUDI
PROGRAM SARJANA BAGIAN HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

PADA HARI, RABU 29 MEI 2013

DAN DINYATAKAN DITERIMA

PANITIA UJIAN

KETUA

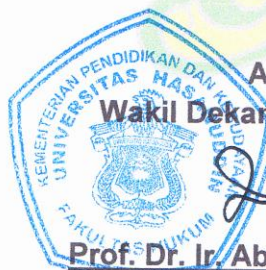


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 1962 0711 1987 031 001

SEKERTARIS



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 1966 1212 1990 032 002



A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BAYU LESMANA
Nomor Pokok : B111 09 300
Bagian : Hukum Pidana.
Judul : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri
Pertaman (Studi Kasus Putusan Nomor:
35/Pid.B/2012/PN.MRS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 1962 0711 1987 031 001

6/5-2013.

Pembimbing II

 6/5 2013

Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 1966 1212 1990 032 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BAYU LESMANA

Nomor Pokok : B111 09 300

Bagian : Hukum Pidana.

Judul : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama
(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi

Makassar, Juli 2013

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik.



Prof. Dr. Ir. Akhrar Saleng, S.H., M.H.
NID. 00419 198903 1 003

ABSTRAK

BAYU LESMANA (B 111 09 300), *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perkawinan tanpa izin isteri pertama (studi putusan nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)* di bawah bimbingan **MUHADAR** (selaku pembimbing 1) dan **HAERANAH** (selaku pembimbing 2).

Penelitian ini berguna untuk mengetahui penerapan hukum materil serta apakah telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan mengetahui bagai mana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang terkait dengan perkara putusan nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan melakukan wawancara kepada hakim yang terkait dengan perkara ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum materil yang ditetapkan oleh Hakim tidak tepat karena karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur sesuai apa yang diatur didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim dalam memutuskan perkara ini dianggap lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS sehingga terdakwa dalam hal ini telah mendapat hukuman dari perbuatan yang tidak dilakukannya akibat dari kelalaian majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan Nomor; 35/Pid.B/2012/ PN.MRS. bahwa apa bila majelis hakim cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS semestinya hakim memutus bebas terdakwa, sebab perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Satu Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkai kata menjadi kalimat dan merangkai kalimat menjadi satu bacaan panjang bukan hal yang mudah menyatukannya dalam suatu karya ilmiah karena diperlukan suatu gagasan pemikiran dan penalaran untuk dapat menyelesaikannya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Suhadi dan Ibunda wahbah yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang hingga dewasa dan membiayaiku dengan setulus hati tanpa pamrih, serta keluarga besarku yang tiada hentinya memberikan dukungan motivasi guna menyelesaikan studiku di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

tercinta. Terimakasih atas segala dukungan yang membuatku bersemangat meraih cita-cita dan menyelesaikan studiku.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua dan Sekertaris beserta segenap staff Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para pembimbing, Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.S., selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para penguji, Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Dara Indarawat S.H., M.H., dan kaisaruddin Kamaruddin, S.H., atas segala saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Maros, dan para stafnya atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
8. Teman-Teman Seperjuangan Syaiful Idris, Roxchy, Asdar kadir, Ishak Purwanto, Faisal Hussenasikin, Muh.fauzan, Edwin, Amirul Bahar, Muh. Hanan, Muh. Ilham Mansyur, Muh. Fadel Istiqlal, Irwandy Kusuma, Muh. Irwanto, Imam Arnan, Muh Firman Indra, Ardillah Rahman, Muh Afif Mahfud, Achmad Imam Lahaya, Nia Astrina Mas'ud Muh Ibnu Tofail, Unirsal, Hikma dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah berjuang bersama baik suka maupun duka dalam menjalani aktifitas kuliah ini.
9. Sahabat-sahabatku alumni 08 SMADA Maros yang telah memberi dorongan dan menjadi motivator buat penulis menyelesaikan masa studi di strata satu ini.
10. Seluruh rekan-rekan alumni PMR SMADA Maros dan anggot PMR SMADA Maros yang telah mendidik dan mengajari penulis banyak hal tentang organisasi, sejak penulis belum menjadi mahasiswa sampai menjadi mahasiswa.
11. Seluruh rekan-rekan KKN Reguler angkatan 82 Kabupaten WAJO terutama teman-teman posko Desa Tenggara.

12. Seluruh teman-teman DOKTRIN 09 serta angkatan sebelumnya yang telah menjadi sumber atmosfer akademisi dalam meningkatkan semangat belajar penulis.
13. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis mohon maaf.

BILLAHIT TAUFIK WALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Mei 2013

Bayu Lesmana
NIM: B 111 09 300

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hukum Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	22
4. Pemidanaan.....	24
5. Jenis Tindak Pidana.....	34
B. Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama	38
1. Pengertian perkawinan	38
2. Prinsip Perkawinan	39

3. Perceraian.....	46
4. Syarat perkawinan lebih dari satu kali	48
5. Unsur-unsur tindak pidana mengadakan perkawinan yang di larang ..	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Penerapan Hukum Materil Terhadap Perkara Putusan Nomor:	
35/Pid.B/2012/PN.MRS.....	55
1. Posisi Kasus	55
2. Dakwaan	56
3. Tuntutan Hukum (<i>requesitoir</i>).....	57
4. Amar Putusan	61
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor:	
35/Pid.B/2012/PN.MRS.....	62
1. Pembuktian Pasal yang Didakwakan	62
2. Hal-Hal Yang Memberatkan dan yang Meringankan	64
C. Analisis penulis.....	65
1. Penerapan Hukum Materil Terhadap Perkara Putusan Nomor:	
35/Pid.B/2012/PN.MRS.....	65

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara	
Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.	71
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dengan manusia lainnya, dan saling melengkapi satu sama lainnya dan hal ini merupakan suatu hal yang alami, sehubungan dengan hal tersebut mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan manusia terhadap kebutuhan fisik hingga kebutuhan non fisik, dengan semakin tingginya kebutuhan ini mengakibatkan angka kejahatan dan pelanggaran semakin tinggi di masyarakat, sehingga mengakibatkan kepentingan individu terlanggar dan dirugikan.

Dalam menjaga kepentingan individu, publik hingga kepentingan negara, negara membuat aturan legislasi dan regulasi untuk melindungi semua kepentingan, sehingga menjamin hak-hak setiap individu, kelompok hingga kepentingan negara sendiri. Seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 (empat) yang berbunyi:¹

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Pembukaan alenia ke-4.

Jelas bahwa dari pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganegaraanya tanpa ada pembeda satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), hukum pidana ini merupakan wujud dari perlindungan negara terhadap warga negaranya dari pihak-pihak yang mengganggu hak dari pada warga negara lainnya.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.²

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan dalam keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 2.

secara tegas tercantum di dalam hukum pidana (KUHPidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam KUHPidana pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:³

Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana ini merupakan perundang-undangan modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam Undang-Undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut hukum adat tidak berlaku. Untuk menghukum orang selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, berarti, bahwa undang-undang tidak mungkin akan berlaku surut (mundur). *Nullum delictum sine praevia lege penali*, artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada lebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh

³R Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 27.

undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.⁴

Asas legalias yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus terlebih dahulu oleh suatu Undang-Undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana harus mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu.⁵

Berlakunya asas legalitas seperti yang diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang memberikan perlindungan rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping melindungi undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas di perbolehkan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 12.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana mengandung tiga pokok pengertian yaitu:⁶

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) jika perbuatan itu tidak diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

Secara konkret, tujuan pembentukan hukum pidana terdiri atas dua hal, yaitu:⁷

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

⁶ *Ibid.* hlm 13.

⁷ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Buku Ajar Fakultas Hukum UNHAS, 2007), hlm. 62.

Dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat akibat dari pada globalisasi mengakibatkan perubahan-perubahan gejala sosial di masyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial di masyarakat, tidak hanya persoalan antar individu di tataran masyarakat, tetapi sangat sering persoalan rumah tangga terjadi di kalangan masyarakat, yang kita ketahui bahwa hubungan keluarga merupakan suatu hubungan emosional yang terjadi akibat pertalian (pernikahan) dan karena hubungan darah.

Setiap manusia menginginkan suatu hari akan mencari pasangan hidupnya dan hal ini merupakan suatu yang alami dan manusiawi sebab ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan psikologis seseorang untuk memiliki pasangan hidupnya, dan hal ini sebanding lurus dengan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, karena idealnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sebaik mungkin dan mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan (hukum adat) hukum agama hingga hukum negara, sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dan pada akhirnya akan mempersatuhkan dua keluarga.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah:⁸

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ialah:⁹

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jelas bahwa sebuah perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan berdasarkan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang di percayai oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatat menurut peraturan perundang undangan, sebab pernikahan itu harus di akui oleh negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak di akui oleh negara secara administratif tetapi perkawinan itu tetap ada tanpa adanya pengakuan oleh negara atas perkawinan tersebut.

Jika ikatan perkawinan itu putus maka akan ada banyak permasalahan yang akan timbul, maka disinilah peran dari pada negara

⁹ *Ibid.* Pasal 2.

untuk melindungi hak-hak dari pada warga negaranya makanya sebuah perkawinan itu harus di daftarkan atau dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, agar perkawinan itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara.

Masalah putusnya perkawinan (perceraian) ada hanya karena putusan pengadilan yang memutuskan bahwa perkawinan itu putus, tetapi putusnya perkawinan akibat dari putusan pengadilan diberikan hanya perkawinan yang meiliki kekuatan hukum dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan ke dua kalinya atau ingin melakukan poligami haruslah mendapatkan persetujuan dari pada istrinya, atau jika ia ingin menikah lagi tanpa ada persetujuan dari pada pasangannya, ia harus menceraikannya dan perceraian ini hanya di mungkinkan jika ada alasan yang di atur didalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi alasan terjadinya perceraian.

Pernikahan yang ke dua kalinya ataukah beberapa kalinya sering mengalami kontroversi di dalam masyarakat dan tidak sedikit yang mengalami permasalahan hingga menjerumus kerana Hukum Pidana , maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan dengan bahan kajian dan penelitian putusan pengadilan mengenai perkawinan yang di larang maka penulis menarik judul:

“Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama” (Studi Kasus Putusan Nomor:35/pid.B/2012/PN.MRS)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 279 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diterapkan dengan benar didalam putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana putusan Nomor:35/Pid.B/2012/PN.MRS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri

Maros Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri.
2. Dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tanpa izin isteri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang kita kenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHPidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh kasrens itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari pengertian itu. Dan sayangnya hingga sekarang belum ada keseragaman pendapat.¹⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 67

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* yang dapat dikatakan juga sebagai peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Para pakar asing hukum pidana juga menggunakan istilah untuk tindak pidana dengan "*strafbare handlung*" diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, yang digunakan para sarjana hukum pidana Jerman dan "*criminal act*" diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹²

Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun didalam literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut: ¹³

- 1) *Tindak Pidana*, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan

¹¹ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 18

¹² *Ibid*, hlm. 19

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 67

perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (lihat di buku *tindak-tindak pidana di Indonesia*).

- 2) *Peristiwa pidana*, digunakan oleh bebera ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, H.J Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana 1*, pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (baca Pasal 14 Ayat 1).
- 3) *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana(dalam buku *Hukum Pidana 1*) A. Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana 1*. Moeliatjo pernah juga menggunakan istilah iini, seperti pada judul buku

beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- 4) *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai didalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
- 5) *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravedik dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- 6) *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Sejata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
- 7) *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Moeliatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁴

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu

¹⁴ Amir ilyas, *op. Cit*, hlm 19.

bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁵

Selanjutnya Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).¹⁶

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat;
- 2) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

¹⁵ Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 224

¹⁶ *Ibid*, hlm. 225

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur delik terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (*an ac does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan kesalahan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*nedlegence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari atas 3 (tiga) bentuk, yakni

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan insyaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan ada dua bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua), yakni:

¹⁷ Leden Marpaung, *Hukum Pidana* (Cetakan Ketuju Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 9

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga perbuatan itu;

b. Unsur Subyektif

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa
 - i. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - ii. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiadakan;

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- i. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- ii. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan

hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik).

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Perbuatan lahiriah tersebut dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut *act* yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun “bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian” disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah perbuatan negatif.¹⁸

Baik *commission* maupun *omission* tersebut tentulah harus tertuang sebagai unsur dalam sebuah rumusan Pasal agar tidak terjadi benturan dengan asas legalitas.

b. Ada Sifat Melawan Hukum.

¹⁸ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Salah satu unsur tindak pidana objektif adalah adanya sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. Dalam bahasa Belanda, melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum).¹⁹

Dalam hukum pidana, dikenal adanya beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:²⁰

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara;
- 2) menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif);
- 3) menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”;
- 4) menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN dalam rancangan KUHPidana memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 65.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 52.

yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Adapun sifat perbuatan melawan hukum terdiri dari dua macam yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil;
 - 2) Sifat melawan hukum materil;
 - 3) Sifat melawan hukum umum;
 - 4) Sifat melawan hukum khusus.
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Alasan pembenar yang dimaksud disini terdiri:

- 1) Daya paksa Absolut.

Daya paksa tercantum di dalam Pasal 48 KUHPidana. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

- 2) Pembelaan terpaksa.

Istilah yang dipakai dalam pembelaan terpaksa oleh Belanda adalah *noodweer* yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.

Unsur-unsur dari suatu pembelaan terpaksa terdiri dari:

- a. Pembelaan itu bersifat terpaksa;

- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- d. Serangan itu melawan hukum;
- e. Menjalankan ketentuan undang-undang;

Pasal 50 KUHPidana menyatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.²¹

- f. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana menyatakan

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 66.

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum.”

Menurut ketentuan Pasal ini, perintah itu disebabkan karena ada adanya hubungan hukum publik. Namun hubungan yang dimaksud tidaklah harus hubungan antara atasan dengan bawahan.

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis ‘tidak pidana tanpa kesalahan’. Sutorius mengatakan “tidak pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan pada pelakunya” pertanggung jawaban pidana dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.²²

a. Mampu bertanggung Jawab.

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab mencakup:²³

1) Keadaan jiwanya:

²² Cahiril Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 22

²³ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 76.

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terebut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, *nyidam*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

3) Kesalahan.

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

4) Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana adalah:

1. Daya paksa relatif;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHPidana;

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHPidana.

4. Pemidanaan

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²⁴

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi siterpidana, korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut.²⁵

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif tersebut. Teori-teori

²⁴ *Ibid.* hlm 95.

²⁵ *Ibid.*

ini mencari dan menjelaskan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apadasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pernyataan-pernyataan mendasar dalam membahas yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pembedaan ini. pernyataan mendasar tersebut timbul berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana sunyektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana obyektif dapat disebut sebagai hukum pidana istimewa.²⁶

Pembedaan itu bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

²⁶ Adami Chaszawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 156

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:²⁷

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang bisa diterapkan mulai dari jaman W.v.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHPidana:²⁸

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagai mana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) Bahwa selain narapidana, mereka harus juga dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Ada berbagai macam pandangan mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu:²⁹

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

²⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 96

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adami Chaszaawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm

- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);
 - 3) Teori gabungan (*vernegings theorien*).
- a. Teori Absolut atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Dasar dari pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti pidana oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat apa akibat dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik pada diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksud untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi dimaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.³⁰

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:³¹

- 1) Dijatuhkan kepada kejahatannya (sudut subyektif dari pembalasan);

³⁰ *Ibid.* hlm 158

³¹ *Ibid.*

- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalngan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Teori absolut. Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk membalas (*vergelsung* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal di akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak.³²

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu pembuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³³

Menurut Stahl mengemukakan bahwa:³⁴

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakit Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara tiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hagel berpendapat bahwa:³⁵

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 98

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana ketidakadilan sebagai pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa:³⁶

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat tercapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetika harus dibalas dengan penjatuhannya pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu memerlukan pidana.³⁷

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, ditinjau dari

³⁶ *Ibid.* hlm 98.

³⁷ Adami Chaszawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm

sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang perlu (*noodzakelijk*) diadakan.³⁸

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu:³⁹

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschedelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:⁴⁰

- 1) Pencegahan umum (*special preventie*);
- 2) Pencegahan khusus (*special preventie*).

Mengenai cara mencapai tujuan, ada beberapa paham, yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu **prevensi khusus** dan **prevensi umum**. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana menjadi orang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah

³⁸ *Ibid.* hlm 162

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm 162.

untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁴¹

Teori yang dimaksud dalam teori Prevensi Umum adalah yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut:⁴²

- 1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana;
- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anselm Van Fierbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus-harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, pasti mereka akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dilakukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat.⁴³

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:⁴⁴

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 99

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm 100

- 1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara ditakut-takuti melalui pencegahan pidana agar ia tidak melakukan niatnya.
 - 2) Akan tetapi apabila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclaring*).
 - 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
 - 4) Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.
- c. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Menurut Simons, dasar primer pemidanaan adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama dijatuhkan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Jika hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka berubahlah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdaya penjahat. Dalam hal ini harus

⁴⁴ *Ibid.*

diingat dalam hal pidana piana dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.⁴⁵

Disamping teori absolut dan teori relatif muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana.⁴⁶

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pada pembalasan, adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, menitik beratkan pada unsur pembalsan yang dianut oleh Pompe menyatakan:⁴⁷

Orang tidak akan mungkin menutup mata peda pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan bangunan bagi kepentingan-kepentingan umum.

⁴⁵ Adami Chaszaawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 167

⁴⁶ *Op. cit.* hlm 101.

⁴⁷ *Ibid.* hlm 102

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:⁴⁸

“pidana” bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan bermasyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan dengan menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan pemberatnya berhubungan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁴⁹

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zennenberg, yang mengatakan bahwa makna dari tiap-tiap pidana ialah pembalasan tapi maksud tiap-tiap pidana yaitu melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan kehormatan terhadap hukum dan pemerintahan.

5. Jenis Tindak Pidana

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, hlm 103

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai berikut:⁵⁰

a. Berdasarkan sistem KUHPidana terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHPidana. Pembedaan dan pembagian terletak pada Buku II KUHPidana yang mengatur tentang kejahatan dan Buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitik beratkan pada penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitikberatkan pada denda atau kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHPidana hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut
- 2) percobaan dan membantu melakukan terhadap anak dibawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Dari segi perumusannya terdapat delik formal dan delik materiil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang

⁵⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), hlm 99

dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materiil suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.

- c. Dari segi sifat perbuatannya terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar aturan. Yang dimaksud perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi terbagi menjadi dua bagian/macam yaitu: delik omisi murni dan tidak murni. Delik omisi murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang diakibatkan dari suatu pengabaian.
- E. Dari bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak sengaja. Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusnya dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusnya tidak mengandung unsur kesengajaan.
- F. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan

terhadap tindakan pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa ada suatu pengaduan.

- G. Dari segi perbuatannya terdapat delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang terdiri dari atas satu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan yaitu tindak pidana yang sedemikian eratny sehingga harus dianggap satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri dengan delik yang diteruskan untuk menentukan suatu perbarengan (*sameenloop*).
- H. Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan sesuatu satu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang.
- I. Dari sudut kepentingan berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan terhadap delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, sedangkan delik berangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan
- J. Dari sudut kepentingan Negara terdapat delik politik dan delik kelompok. Delik politik ialah tindak pidana yang tujuannya di arahkan kepada keamanan Negara dan terhadap kepala Negara, sedangkan delik kelompok yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap

keamanan Negara atau kepala Negara, sedangkan delik kelompok yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan Negara atau kepala Negara.

- K. Dari sudut unsur perbuatannya terdapat delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik peringatan. Delik sederhana yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang telah dirumuskan oleh pembukuan undang-undang. Delik dengan pemberatan yaitu tindak yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok akan tetapi ada unsur-unsur yang ditambahkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik peringatan ialah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur lainnya dan dapat meringankan ancaman pidana.
- L. Dari segi subyek hukumnya terdapat delik *propria* (khusus) dan delik *komun* (umum). Delik *propria* atau delik khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan delik *komun* atau delik umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang.

B. Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ialah:⁵¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut undang-undang ini jelas bahwa perkawinan bukan hanya mencakup hubungan keperdataan tetapi juga mencakup hubungan lahir dan batin dimana seorang pria dan seorang wanita disatukan dalam ikatan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Prinsip Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini terdapat prinsip demi memajukan cita-cita luhur dari perkawinan. Dari undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa yang sudah-sudah. Oleh karena itu bukannya tidak mungkin ada berbagai pembaharuan atau perubahan dalam melaksanakan hukum.⁵²

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

⁵² Asro Sosroatmodjo, Wasit Alawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm 35

Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁵³

- a. Asas sukarela;
- b. Partisipasi keluarga;
- c. Perceraian dipersulit;
- d. Polygami dibatasi secara ketat;
- e. Kematangan calon mempelai;
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

a. Asas sukarela

Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus di dasarkan pada persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 Ayat (1)). Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. pasal tersebut menjamin tiadanya kawin paksa. Dengan batasan umur yang minimal dapat kawin (16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria) dan dalam kondisi masyarakat kita yang semakin terbuka ini, maka kawin paksa benar-benar akan dapat dicegah.

b. Partisipasi Keluarga

Sebenarnya, anak yang telah mencapai umur perkawinan (Pasal 7 Ayat (1) itu anak dipandang telah dewasa. Ia mampu bertindak hukum

⁵³ *Ibid.*

dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit kecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu.

Oleh karena itu bagi yang masih berada di bawah umur 21 tahun (peria dan wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Dalam keadaan orang tua tiada, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin itu dapat diperoleh dari pengadilan apabila karena suatu atau lain sebab izin termasuk tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut (Pasal 6 Ayat (4), (5)).

c. Perceraian Dipersulit

Perceraian adalah suatu yang amat tidak disenangi oleh isteri. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis.

Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

Banyaknya *broken home* telah membawa akibat langsung timbulnya dan tambahannya problem anak-anak nakal (*juvenile delinquency*).

Hingga kini angka perceraian masi tinggi. Hal ini disebabkan karena penggunaan hak cerai secara sewenang-wenang, dengan dalil hak suami. Karena itu kepincangan masyarakat ini harus diperbaiki. Karena itu undang-undang ini menentukan bahwa untuk memungkinkan adanya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Itupun setelah pengadilan berusaha tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39). Pelaksanaan perceraian menurut undang-undang ini adalah merupakan hal yang baru bagi masyarakat kita.

d. Polygami dibatasi secara ketat

Perkawinan menurut undang-undang ini adalah monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang. Namun demikian beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan putusan oleh pengadilan.

Seperti juga perceraian maka poligami adalah merupakan momok yang ditakuti oleh kaum wanita. Pelaksanaan poligami tanpa aturan yang ketat telah menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga. Antara hubungan istri /madu menjadi tegang, sementara hubungan antara anak-anak yang berlainan ibu menjurus pada pertentangan, apabila sibapak meninggal dunia. Undang-undang mengatur bagai mana caranya melakukan poligami. Untuk itu harus di penuhi tahap-tahap dibawah ini secara berturut-turut (Pasal 4 dan 5) yakni:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri;
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 2) Adanya persetujuan dari istri;
Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adail terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- 3) Izin dari pengadilan.

Tentang kemandulan, tentu saja pengadilan akan meneliti secara obyektif, karena dengan melalui pemeriksaan medis akan akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang tidak dapat memberi keturunan apakah istri ataukah justru suami itu sendiri. Mengingat cara-cara pengaturan

yang ketat itu, maka diharapkan angka poligami akan dapat ditekan serendahmungkin serta segala akibat buruknya.

e. kematangan calon mempelai

undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawa umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kendudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu undang-undang ini menentukan batasan umur kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Wanita adalah paling banyak memerlukan perlindungan. Pada masa-masa yang lalu, di kala pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanitalah yang akan paling banyak mengalami penderitaan. Akibat perceraian yang semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dan tidak jarang nafkah untuk anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab si mantan suami. Dan pada umumnya wanita juga enggan untuk menuntut bekas

suaminya untuk membayar nafkah tersebut, ia lebih bersikap diam walaupun dengan konsekuensi penderitaan.

Undang-undang ini berusaha untuk menghilangkan akibat-akibat negatif tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dimungkinkan adanya perjanjian di mana si wanita dapat ikut menentukan isinya (Pasal 29);
- 2) Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami, dan bilah terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukum (Pasal 35 sampai dengan 37);
- 3) Suami/bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sekalipun terjadi perceraian (Pasal 41 Huruf b);
- 4) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Huruf c) dalam hal terjadi perceraian yang menurut pertimbangan pengadilan perlu ditetapkan demikian;
- 5) Wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria dalam hal menentukan jodohnya (Pasal 6 Ayat 1) dan dalam membuat syarat-syarat perjanjian yang diinginkan oleh kedua belah pihak (Pasal 29)

3. Perceraian

Dalam Pasal 38 undang-undang perkawinan diterangkan bahwa perkawinan dapat putus karena:⁵⁴

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Putusan pengadilan

Dalam kalimat tersebut nampak jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (Huruf b) adalah berbeda dengan putusnya perkawinan karena/atas putusan pengadilan (huruf c). Untuk undang-undang perkawinan. mengenai putusnya perkawinan karena kematian (Huruf a) adalah jelas karena tidak perlu dijelaskan lagi.

Dalam Pasal 39 undang-undang perkawinan diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat itu cukup gamlang, yaitu “di depan sidang pengadilan” dan tidak “dengan putusan pengadilan” pasal ini dimaksud untuk mengatur “TALAK” pada perkawinan Agama Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip terdapa dalam undang-undang perkawinan. Prinsip itu tercantum didalam penjelasan undang-undang perkawinan pada Angka 4 Huruf e sebagai berikut: karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

⁵⁴ *Ibid.* hlm 59

terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus didepan sidang pengadilan.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam Pasal 19 syarat perceraian dijelaskan sebagaiberikut: ⁵⁵

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

⁵⁵ Republik Indonesia , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 19

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Syarat perkawinan lebih dari satu kali

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami (Pasal 3 Ayat (1), bahwa seseorang pria idealnya hanya memiliki seorang isteri tetapi mengingat bahwa undang-undang perkawinan ini menganut sistem hukum Islam dimana dalam hukum Islam memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari seorang isteri. Syarat seorang Pria dapat menikahi lebih dari seorang wanita diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 yang berbunyi:⁵⁶

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Kemudian syarat seorang suami yang ingin beristeri untuk lebih dari sekali dijelaskan didalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 3

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 9.

- (1) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam undang-undang perkawinan mengisyaratkan bahwa ketika seorang pria ingin beristeri lebih dari seorang maka didalam undang-undang perkawinan secara tegas memberikan syarat yang harus dipenuhi sesuai yang dijelaskan didalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2). Diharapkan dengan adanya syarat ini memberi batasan agar seorang pria yang ingin memiliki isteri lebih dari satu orang tidak sewenang-wenang sebab undang-undang membatasi untuk itu karena ada syarat yang harus dipenuhi.

5. Unsur-unsur tindak pidana mengadakan perkawinan yang di larang

Yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang di larang dalam Pasal 279 Ayat (1) Butir 1 KUHPidana berbunyi:⁵⁷

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

uraian unsur-unsur di dalam Pasal 279 Ayat (1) Butir 1 sebagai berikut:

a. Barang Siapa

merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa "*barangsiapa*" tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

b. Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu

Dalam unsur ini syarat supaya orang dapat dipidakan dalam Pasal 279 Ayat (1) Butir 1, ialah orang itu harus sengaja mengetahui bahwa ia

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 279 Ayat (1) Butir 1

dulu pernah kawin dan perkawinannya ini belum dilepaskan menurut pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas:⁵⁸

- a. Karena mati;
- b. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 (sepuluh tahun) tahun dan diikuti dengan perkawinan salah satu orang itu dengan orang lain;
- c. Karena ada ponis dari hakim;
- d. Karena perceraian bisa menurut peraturan dalam B.W.

Yang tunduk di dalam peraturan pernikahan di dalam B.W. ialah orang Eropa. Orang-orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Jika beragama Kristen juga tunduk pada peraturan ini. bagi mereka yang tunduk pada peraturan B.W., maka adanya suatu perkawinan (nikah) merupakan suatu penghalang untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin 2 (dua) kali dan dinamaka *bagimie* dan dihukum menurut pasal ini).

Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang yang beragama Islam di Indonesia dapat kawin dengan 4 (empat) orang Istri, bahwa adanya perkawinan yang lebih dari 4 (empat) kali itu barulah merupakan pelanggaran Pasal 179 Ayat (1) Butir 1.

Akan tetapi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan Indonesia tidak lagi di perbolehkan untuk dengan lebih dari seseorang

⁵⁸ R Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 203.

bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu mendapat izin berupa putusan pengadilan setempat. Bagi perempuan Indonesia, Tionghoa dan lain-lain beragama Islam, hanya di perbolehkan kawin bersama-sama dengan seorang laki-laki, jadi kedudukannya sama dengan mereka yang tunduk pada B.W.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di kabupaten Maros.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis memfokuskan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Maros. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*. Metode analisis data adalah suatu metode dimana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Materil Terhadap Perkara Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

1. Posisi Kasus

Pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011, telah terjadi perkawinan antara terdakwa dengan ----- sekitar Pukul 22:30 WITA, dimana perkawinan mereka dilaksanakan dirumah mempelai wanita yang beralamat di Desa Tomppo ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten maros. Sebelum perkawinan ini terjadi, terdakwa melamar kerumah wanita tersebut dengan didampingi oleh salah satu kerabatnya dimana proses lamaran ini disaksikan oleh pihak keluarga wanita, kemudian dilakukanlah proses lamaran tersebut dan dimana terdakwa mengaku kalo dirinya sudah tidak memiliki ikatan perkawinan lagi dengan isterinya yang dulu, bahwa lelaki tersebut sudah bercerai dengan isterinya yang terdahulu jadi sekarang dirinya sudah berstatus cerai dan dia sekarang berstatus duda.

Pada waktu pelamaran, tercapailah kesepakatan diantara pihak wanita dan pihak laki-laki mengenai mahar perkawinan. Maka diatara pihak melakukan perjanjian tertulis mengenai uang belanja yang akan diberikan kepada pihak wanita, diberikanlah uang

belanja sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) dan satu petak sawah, yang dimana perjanjian ini disaksikan pihak wanita dan lelaki.

Tidak lama setelah perkawinan mereka berlangsung, mereka melakukan syukuran untuk merayakan perkawinan mereka dan sekaligus untuk memperkenalkan kepada kerabat mereka dan tetangga bahwa mereka sudah resmi sebagai sepasang suami isteri dan mereka sudah tinggal satu atap layaknya sepasang suami isteri. Kemudian isteri pertama terdakwa mendengar bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, isteri dari terdakwa tidak pernah meminta izin untuk kawin lagi apalagi bercerai dengan ----- karena dia merupakan isteri yang sah dari terdakwa, kemudia istri dari terdakwa melaporkan suaminya dan isteri ke duanya kepolsek Sektor Mallawa karena tidak menerima perbuatan terdakwa.

2. Dakwaan

Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 15 februari 2012 Nomor: PDM-03/CAMBA/Epp.2/2/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa pada hari rabu, tanggal 12 oktober 2011, sekitar pukul 22:30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2012, bertempat di Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mmallawa Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, mengadakan perkawinan Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi

penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada saat sebelum kejadian terdakwa telah terikat tali perkawinan dengan korban sejak tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang belum ada perceraian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang disebutkan diatas, ----- melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan terdakwa lainnya (berkas perkara diajukan tersendiri) dimana sebelumnya terdapat hasil kesepakatan secara tertulis tentang mahar perkawinan yang ditandatangani oleh pihak terdakwa -----, dari pihak wanita yang disaksikan oleh ----- dan ----- kemudian menunjuk ----- untuk bertindak sebagai wali dari perempuan dan selanjutnya perkawinan dilaksanakan;
- Bahwa beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan terdakwa bersama keluarga membuat acara syukuran dengan memanggil para keluarga dan tetangga untuk datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk memperkenalkan bahwa terdakwa telah menjadi suami dari perempuan tersebut.
- Bahwa korban keberatan atas perkawinan tersebut dan melaporkannya ke kantor Kepolisian sektor Mallawa;

Sebagai mana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

3. Tuntutan Hukum (*requesitoir*)

Adapun yang menjadi tuntutan hukum (*requesitoir*) dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa Tanggal 3 April 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ----- terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa ----- berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan alat bukti surat berupa 1 (satu) buah buku nikah isteri ----- dengan nomor kutipan Akta Nikah 183/1987 dan 1 (satu) lembar foto copy hasil kesepakatan secara tertulis tentang mahar perkawinan berupa uang belanja sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sawah satu petak yang ditandatangani oleh pihak terdakwa yaitu lelaki -----, dari pihak perempuan ----- yang disaksikan oleh -----, agar dilampirkan didalam berkas perkara -----;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Keterangan Saksi

Bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi -----

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena ia merupakan suami saksi;
- Bahwa telah terjadi perkawinan antara terdakwa dan ----- pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 sekitar Pukul 22:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros;
- Bahwa terdakwa menikahi ----- sama sekali tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi selaku istrinya yang sah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui pernikahan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini sesuai dengan bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa buku nikah yang dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi -----

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan dengan keluarga kamanakan saksi;
- Bahwa telah terjadi perkawinan antara terdakwa dengan ----- pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros;
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi dan menyampaikan keinginannya untuk kawin lagi;

- Bahwa saksi yang menikahkan terdakwa sekaligus sebagai wali hakim dari -----;
- Bahwa setelah perkawinan terdakwa dan ----- hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melihat surat cerai terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi -----

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi perkawinan antara terdakwa dengan -----
 - pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober Tahun 2011 sekitar Pukul 12:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi keinginannya untuk kawin lagi karena sudah 3 (tiga) bulan sudah tidak bersama dengan korban;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mendatangi rumah -----
 - untuk melamar -----;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menikahi -----, karena saksi menyerahkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sawah sepetak kepada pihak -----;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi -----

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi perkawinan antara terdakwa dengan -----
 - pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober Tahun 2011 sekitar Pukul 12:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga terdakwa menyerahkan mahar berupa uang belanja Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sawah sepetak yang dimuat dalam kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terdakwa dan pihak -----;
 - Bahwa setahu saksi setelah perkawinan terdakwa dan ----- hidup bersama sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat surat cerai terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi -----

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara terdakwa dengan -----
 - pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober Tahun 2011 sekitar Pukul 12:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga terdakwa menyerahkan mahar berupa uang belanja Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sawah sepetak yang dimuat dalam kesepakatan secara tertulis daan ditandatangani oleh pihak terdakwa dan pihak -----;
 - Bahwa saksi telah benar-benar menikah dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi samasekali tidak pernah melihat surat cerai dari terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Keterangan Terdakwa

Bahwa persidaangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan telah melaksanakan telah melaksanakan perkawinan dengan ----- pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober Tahun 2011 sekitar Pukul 12:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros;
- Bahwa ketika terdakwa masuk melamar kerumah pihak ----- dengan mengatakan bahwa ia sudah cerai dengan isteri (korban);
- Bahwa terdakwa membenarkan dipersidangan bahwa ia belum cerai dengan korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan dipersidangan ia belum bercerai dengan korban;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan ----- hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Barang Bukti

Bahwa selain itu oleh penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah buku nikah istri ----- dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 183/1987 dan 1(satu) lembar foto copy hasil kesepakatan secara tertulis tentang mahar perkawinan berupa uang belanja sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sawah satu petak yang ditanda tangani oleh pihak terdakwa yaitu lelaki -----, dari pihak perempuan -- ----- dan ----- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah melaksanakan perkawinan dengan ----- pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 Pukul 22:30 Wita bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecaamatan Mallawa Kabupaten Maros;
- Bahwa benar ketika terdakwa masuk melamar kerumah pihak ----- dengan mengatakan bahwa ia sudah bercerai dengan isteri (korban);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan dipersidangan bahwa ia sudah belum bercerai dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa setelah menikah dengan perempuan ----- --- hidup bersama sebagai suami isteri;

4. Amar Putusan

M e n g a d i l i

1. **Menyatakan** terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”
2. **Menjatuhkan** pidana kepada terdakwa ----- dengan penjara selama 5 (lima) bulan;
3. **Menetapkan** penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. **Memerintahkan** agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. **Menetapkan** agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah isteri ----- dengan nomor kutipan Akta Nikah 183/1987 dan 1 (satu) lembar foto copy hasil kesepakatan secara tertulis tentang mahar perkawinan berupa uang belanja sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sawah satu petak yang ditandatangani pihak terdakwa yaitu lelaki -----, yang disaksikan oleh ----- dan -----, agar dilampirkan dalam berkas perkara -----;
6. **Membebaskan** terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan

Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

1. Pembuktian Pasal yang Didakwakan

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuata orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yaitu siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini terdakwa ----- yang telah diperiksa identitas yang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum ternyata seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui padahal perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Manimbang bahwa, yang dimaksudkan dengan perkawinan menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Manimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi korban belum samasekali melakukan perceraian;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah nyata menikah lagi dengan orang lain yaitu dengan ----- tanpa persetujuan korban dalam hal ini selaku isteri yang sah dari terdakwa, yang dimana perkawinan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 sekitar Pukul 22:30 WITA bertempat di rumah ----- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, sehingga majelis hakim mendapatkan unsur kedua ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa, dari pernyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagai mana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat mencapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan sosial (*sosial justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum

pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*korektif*)
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa didasarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*educatif*)
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa suatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (*preventif*);
4. Pemberantasan (*revresif*);
Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi hukum, oleh karena itu maka majelis hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

2. Hal-Hal Yang Memberatkan dan yang Meringankan

Bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dimana terdakwa masih memiliki isteri yang sah;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, namun karena dipakai dalam berkas lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

C. Analisis Penulis

1. Penerapan Hukum Materil Terhadap Perkara Putusan

Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan untuk menganalisis Pasal yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dimana menurut penulis pasal yang dituntutkan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa merupakan sebuah kekeliruan yang besar, dimana dalam perkara Nomor:

35/Pid.B/2012/PN.MRS dalam dakwaan yang berbentuk tunggal dimana terdakwa dituntut dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, dimana dalam unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Dimana dalam unsur yang ke 2 (dua), mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Dalam unsur ke 2 (dua) ini tidak terpenuhi.

Dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru terpenuhi jika:

1. Perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan haruslah menurut peraturan perundang-undangan yang ada sebab seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancamkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dimungkinkan untuk perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada, berarti kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya bahwa perkawinan itu dianggap sah menurut hukum jika perkawinan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana menurut Undang-undang ini perkawinan itu baru dikatakan sah menurut hukum jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi bahwa perkawinan itu adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian lanjut di Ayat (2) bahwa perkawinannya itu haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa jika salah satu dari Ayat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum atau pernikahannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

2. Kemudian dalam unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, bahwa perkawinan yang dilakukan akan terhalang oleh pernikahan terdahulunya sebab ketika seorang suami ingin melakukan pernikahan ke 2 (dua)nya ataupun pernikahan-pernikahan selanjutnya haruslah merujuk pada apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristeri lebih dari sekali dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan, pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah isteri sah terdahulunya. Sehingga seseorang yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari isteri terdahulunya;

Dalam hal ini jaksa penuntut umum dianggap keliru didalam menetapkan pasal yang akan dituntutkan kepada terdakwa dimana jaksa penuntut umum tidak memperhatikan undang-undang yang lainnya yang terkait dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini undang-undang yang terkait dengan pasal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab yang dipermasalahkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masalah perkawinan sehingga tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa haruslah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkara yang diputuskan oleh Pengadilan negeri Maros putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS. menurut penulis adalah sebuah kekeliruan sebab jaksa penuntut umum didalam melakukan penuntutan hukum terhadap dalam perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS telah keliru didalam penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

Dalam kasus putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS, jika saja jaksa penuntut umum ragu dengan pasal yang akan dituntutkan, ataukah jaksa penuntut umum merasa bahwa Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemungkinan tidak terbukti didalam proses persidangan maka jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya seharusnya berbentuk

alternatif. Bahwa dalam perkara putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS terdakwa dituntut dengan 2 (dua) pasal yang berbeda, sebab selain Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jadi disini jaksa penuntut umum menuntut pasal berlapis agar terdakwa terjerat dengan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Sebab menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan gendak (overspel), dimana perbuatan terdakwa dengan melakukan perkawinan ke 2 (dua) kalinya tidak sah menurut hukum artinya bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan gendak (overspel) sebab perkawinannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sesuai apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam rumusan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang itu barulah dikatakan melakukan gendak (overspel) jika seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel) dengan seorang wanita

yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya dan atas perbuatan terdakwa hanya dapat dilakukan penuntutan jika istri (korban) melakukan pengaduan sebab Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik aduan, artinya bahwa kasus putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS menurut penulis merupakan tindak pidana yang diancam didalam pasal Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan tindak pidana yang diancam didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS.

Dalam pembahasan ini penulis hanya akan memfokuskan pada pembuktian unsur yang diputuskan dalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS sebab penulis beranggapan bahwa yang menjadi sorotan utama dalam putusan ini adalah pasal yang didakwakan pada terdakwa, dan pada akhirnya diputuskan bersalah oleh majelis hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

pada Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS menurut penulis hakim telah lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sebab dalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS telah diuraikan segala hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan bahwa bahwa Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum telah dibuktikan dipersidangan dengan mendengarkan kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim seperti misalnya unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum yang dianggap telah mencocoki perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan pertimbangan hakim bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur “barangsiapa” yaitu siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini terdakwa ----- yang telah

diperiksa identitas yang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum ternyata seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Padahal Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu.

Menurut majelis hakim yang dimaksudkan dengan perkawinan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penulis bahwa dari pertimbangan hakim diatas merupakan pengertian perkawinan dan bukanlah sarat sah nya sebuah perkawinan yang ada didalam pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa menurut undang-undang ini perkawinan itu baru dikatakan sah menurut hukum jika

perkawinan tersebut dilakukan menurut aturan-aturan agama dan kebiasaan kemudian dicatatkan menurut aturan perundang undangan yang ada yaitu merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga penulis berpendapat bahwa hakim dalam hal ini keliru dalam mendefenisikan apa yang dimaksudkan dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS hakim berpendapat bahwa perkawinan itu apabila dilakukan menurut aturan-aturan agama dan kebiasannya maka perkawinannya itu sudah sah, sehingga dapatlah dikatakan bahawa mereka yang melakukan perkawinan menurut aturan-aturan agama dan kebiasaan maka mereka sudah sah sebagai sepasang suami isteri. Menurut hakim bahwa ketika seseorang telah diakui didalam masyarakat sebagai suami isteri maka walaupun mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka menurut peraturan perundang-undangan maka mereka sudah sah sebagai pasangan suami istri.

Tetapi menurut penulis ketika kita berbicara tentang Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka kita harus beranjak pada aturan hukum, sebab perkawinan yang dimaksudkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bukan perkawinan yang menurut agama atau kebiasaan. Sehingga didalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS kita harus melihat perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dari sisi hukum positif dan hukum agama:

1. Hukum Positif

Dari segi hukum positif maka kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apakah dalam perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa sah menurut hukum atau tidak. Syarat sahnya sebuah perkawinan diatur didalam pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Ayat (1) bahwa perkawinan itu sudah sah apa bila dilakukan menurut aturan-aturan agama dan kebiasaan,

kemudian di Ayat (2) dimana perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga apa bila pasal 2 Ayat (1) dan (2) tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, kemudian karena terdakwa telah terikat perkawinan sebelum terdakwa menikah maka dalam hal ini ketika terdakwa ingin melakukan perkawinan untuk ke 2 (dua) kalinya atau lebih maka terdakwa haruslah mengikuti apa yang dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dimaksud pihak yang bersangkutan ada isteri terdakwa dimana isteri terdakwalah yang harus memberikan izin untuk terdakwa untuk dapat menikah lagi kemudian dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pria yang bermaksud kawin lebih dari sekali harus ada alasan-alasan yaitu (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan, (3) tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah memiliki kekuatan hukum sebab tidak berdasarkan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita, kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam hukum islam bahwa seorang yang ingin melakukan perkawinan yang ke 2 (dua) kalinya atau lebih haruslah memperhatikan hal-hal yang menjadi aturan didalam hukum islam dimana seorang lelaki yang hendaknya melakukan perkawinan lagi haruslah memperhatikan hal-hal bahwa suami tersebut mampu secara fisik maupun mental, kemudian ia harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya dan kemudian melakukan akad nikah. Kemudian menurut hukum islam, akad nikah merupakan suatu hal yang sangat penting yang mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi tertentu sebagai mana yang telah ditetapkan didalam syari'at islam. Oleh karena

itu pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam adalah perbuatan yang sia-sia. Dalam hal ini menurut penulis bahwa terdakwa benar telah melakukan perkawinan dengan melakukan akad nikah yang dilangsungkan sesuai dengan syari'at islam, tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa didalam persidangan (pengakuan terdakwa) bahwa terdakwa mengaku pada saat terdakwa melakukan pelamaran kerumah calon mempelai wania terdakwa mengaku bahwa dirinya saat ini tidak lagi memiliki ikatan perkawinan dengan isterinya yang terdahulu sehingga pihak wanitapun beranggapan bahwa terdakwa berstatus duda. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan. Jika perkawinaan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah akibat dari pada kehilafan, kehilafan yang dimaksud disini jika dalam proses perkawinan terjadi kekeliruan atau kebohongan dan ketidak tahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipadang tidak berdosa. Sehingga jika telah terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai *swathi' syubhat*, tidak dipandang

sebagai perzinahan, sehingga yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi zina, isteri harus beriddah apabila perkawinan dibatalkan sebab perkawinan yang seperti ini dapat dibatalkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu bukan dipandang sebagai anak zina dan nasabnya dipertalikan pada ayah dan ibunya. Tetapi dalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS yang didalam putusan ini telah diketahui fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah hidup bersama layaknya sebagai pasangan suami isteri dan terdakwa telah sengaja melakukan kebohongan untuk dapat menikah. Tetapi jika seseorang sehingga perkawinan itu tidak menjadi sah menurut syari'at islam karena sengaja melakukan kesalahan dengan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian wajib dibatallkan. Jika perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan maka isteri tersebut tidak diwajibkan beriddah, tetapi terdakwa dalam hal ini telah melakukan hubungan suami isteri atau persetubuhan maka isteri tersebut harus beriddah. Orang yang melaksanakan perkawinan tersebut dipandang bersalah dan berdosa, dapat dituntutkan

pidana Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirka tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.

Dari pandangan dua hukum diatas baik itu ditinjau dari hukum positif maupun hukum islam jelas bahwa perkawinan ke 2 (dua) terdakwa tidaksah baik secara hukum positif dan hukum islam sehingga perbuatan dari terdakwa merupakan perbuatan zinah baik itu ditinjau dari hukum pidana karena mencocoki rumasan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditinjau dari segi hukum islam perbuatan terdakwa tetap adalah perbuatan zina sebab didalam proses perkawinannya telah terjadi rangkaian kebohongan.

Berdasarkan fakta dipersidangan terhadap putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS hakim telah memeriksa keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana sampai

saat ini berdsarkan keterangan saksi korban belum sama sekali melakukan perceraian;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah nyata menikah lagi dengan orang lain yaitu dengan ----- tanpa persetujuan korban dalam hal ini selaku isteri yang sah dari terdakwa, yang dimana perkawinan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 sekitar Pukul 22:30 WITA bertempat dirumah ----- -- di daerah Tompo Ladang Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, sehingga majelis hakim mendapatkan unsur kedua ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa menurut majelis hakim telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Apakah mungkin seseorang dipidakan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana padahal pernikahan terdakwa sendiri tidaklah memiliki kekuatan hukum yang sah dan dilihat/ ditinjau dari syari'at islampun perkawinan terdakwa tidak sah.

Sehingga majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS telah lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini yang padahal perkara ini lebih condong mengarah kepada perzinahan baik itu ditinjau dari hukum pidana maupun syaria'at islam.

Artinya bahwa seharusnya majelis hakim dalam perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS diputus bebas sebab perbuatan terdakwa tidak sesuai atau tidak mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa telah keliru didalam menetapkan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa, dimana jaksa penuntut umum tidak memperhatikan unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui “bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Dimana perkawinan yang dimaksud Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah perkawinan yang sah menurut hukum, dan perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dimaksud didalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Berarti perbuatan terdakwa tidaklah mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Majelis hakim didalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS telah lalai sebab majelis hakim memutuskan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS memutus bersalah kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa dianggap telah mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana majelis hakim beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa telah sah. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan terdakwa merupakan perzinahan dan mencocoki rumusan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab terdakwa masih terikat tali perkawinan

dengan isterinya yang sah dan perkawinan kedua terdakwa tidaklah memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan gedak (*overspel*). Atas perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS seharusnya majelis hakim memutuskan bebas atas perbuatan yang dituntutkan kepada terdakwa.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar setiap perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jaksa Penuntut Umum agar lebih jeli dalam melakukan penuntutan hukum;
2. Jaksa Penuntut Umum harus memahami maksud dari setiap unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa agar tidak lagi terjadi kesalah dalam penerapan pasal yang akan dituntutkan kepada terdakwa;
3. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memahami betul apa yang dimaksudkan dengan perkawinan.

4. Setiap perkara yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, majelis hakim haruslah memahami betul aturan-aturan hukum yang ada, baik itu hukum positif maupun hukum agama dan kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Pengadilan Agama*. Pustaka Bangsa Press: Jakarta
- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- . 2009. *pelajaran Hukum pidana 2*. PT. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- . et. al. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Reneka Cipta: Jakarta.
- . 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta
- Chaerul Huda. 2011. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana: Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2010. *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*. Yamina Jaya: Makassar
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H. Arso Sosroatmodjo, H. A. Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang: Jakarta

Leden Marpaung. 2012. *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press: Malang.

LAMPIRAN